

## ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih serta munculnya internet sebagai sarana teknologi informasi dan komunikasi yang makin mudah akses menciptakan efek bagi beberapa kalangan yang menggunakannya. Mereka seringkali melakukan tindak kejahatan melalui internet tersebut. Kejahatan yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi itu dikenal dengan *cyber crime*. *Cyber crime* juga merupakan salah satu ancaman dalam pertahanan yang kini sedang berkembang di berbagai negara. Jepang merupakan salah satu negara dengan dengan tindakan *cyber crime* yang setiap tahunnya selalu meningkat. Dengan adanya *cyber crime* yang terus meningkat setiap tahunnya di Jepang, maka penulis sangat tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai berbagai upaya yang dilakukan Jepang dalam penanganan *cyber crime* pada masa pemerintahan Shinzo Abe 2012 – 2015

Oleh karenanya pada masa pemerintahan Shinzo Abe untuk menanggulangi kejahatan *cyber crime* maka dilakukan berbagai upaya. Diantaranya adalah pengembangan sistem hukum dalam pemberantasan *cyber crime* yang dilakukan oleh pemerintah Jepang ada awalnya di dasarnya pada *soft law* yang memiliki dampak hukum minimal bagi si pelaku. Setelah konvensi Wina pada tahun 2000 kemudian pemerintah melakukan ratifikasi dengan membentuk *hard law* yang bertujuan mempertegas payung hukum bagi pelaksanaan pemberantasan *cyber law*. Bentuk hukum dalam bentuk *hard law* diantaranya adalah *First National Strategy* (Strategi Nasional Pertama) serta *Penal Code of Japan* (yang di dalamnya memuat mengenai *Unauthorized Computer Access Law* dan *The Law For Punishing Acts Related To Child Prostitution and Child Pornography*). Dalam hal lain, pemerintah Jepang juga melakukan penguatan dan pembentukan lembaga yang menegakkan hukum, diantaranya adalah pembentukan Pusat Keamanan Informasi Nasional Jepang atau *National Information Security Center* serta GSOC (*Government Security Operation Team*). Sementara itu untuk memperkuat kerangka hukum dan mengatasi kejahatan *cyber crime* lintas negara maka Jepang juga melakukan berbagai kerjasama dengan beberapa negara. Diantaranya adalah kerjasama bilateral terkait dunia maya dan jaringan internet antara lain dengan negara Amerika Serikat, ASEAN dan India.

**Kata Kunci** : Penanganan Cyber Crime, Shinzo Abe, Jepang

# **JAPAN EFFORTS TO HANDLE CYBER CRIME DURING SHINZO ABE GOVERNMENT 2012 – 2015**

## **ABSTRACT**

Advances in information technology and communication increasingly sophisticated and the emergence of the internet as a means of information and communication technologies are increasingly easy access to create effects for some people who use it. They often commit crimes via the internet. Crimes committed through information and communication technology was known as cyber crime. Cyber crime is also a threat in a defense that is now being developed in various countries. Japan is one country with the acts of cyber crime is increasing every year. With the cyber crime continue to increase every year in Japan, the authors are very interested to analyze the problem. In this study the authors will examine the various efforts made by Japan in the handling of cyber crime in the reign of Shinzo Abe 2012 – 2015.

Therefore, during the reign of Shinzo Abe to tackle cyber crime efforts are undertaken. Among them is the development of legal systems in the fight against cyber crime committed by the Japanese government initially based on the existing soft law that has minimal legal repercussions for the perpetrator. After the Vienna Convention in 2000 and then the government ratified by forming hard law which aims to reinforce the legal basis for the implementation of the eradication of cyber law. The legal form in hard law such as First National Strategy (Strategy First National) and the Penal Code of Japan (in which includes the Unauthorized Computer Access Law and The Law For punishing Acts Related To Child Prostitution and Child Pornography). In other respects, the Japanese government is also strengthening and establishment of institutions that uphold the law, including the establishment of the National Information Security Center of Japan or the National Information Security Center and GSOC (Government Security Operation Team). Meanwhile, to strengthen the legal framework and addressing transnational cyber crime then Japan has also initiated cooperation with several countries. Among them is the bilateral cooperation related to cyberspace and the internet among others, by the United States, ASEAN and India.

**Keywords :** To Handle Cyber Crime, Shinzo Abe, Japan